

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1987, "Peradilan Bebas Negara Hukum", Erlangga, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi, 1998, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", edisi revisi IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Arivia, Gadis, 2006, "Feminisme: Sebuah Kata Hati", Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2004, "Metode Penelitian Hukum", Rineka Cipta, Jakarta
- Bellefroid, 1952, "Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederlands", Dekker & Van Vegt, Nijmegen Utrecht
- Dellyana, Shant, 1988, "Konsep Penegakan Hukum", Liberty, Yogyakarta
- Fakih, Mansour, 2008, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Insist Press, Yogyakarta
- Fauzan, H.M., 2015, "Peranan PERMA dan SEMA dalam Pengembangan Hukum Indonesia menuju Peradilan yang Agung", Prenada Media, Jakarta
- Franken, H., 1997, "Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke", Gouda Quhnt
- Heroeputri, Arimbi (penyunting), 2005, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum", Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta.
- Irianto, Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo, 2006, "Perempuan di Persidangan – Pemantauan Peradilan Bersperspektif Perempuan", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Irianto, Sulistyowati, 2008, "Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan", Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS RI, 2016, "Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019", BAPPENAS RI, Jakarta

Khusnaeny, Asmaul, dkk., 2017, "Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep SPPT PKKTP", Komnas Perempuan, Jakarta

Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2011, "Politik Hukum", Sinar Grafika, Jakarta

MaPPI FHUI, 2016, "Asesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan", Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

MaPPI FHUI, 2016, "Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, & Realita", Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, "Penelitian Hukum", Edisi Revisi, Prenadamedia, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Jakarta

Munti, Ratna Batara, 2008, "Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan", PSKW UI dan Yayasan TIFA

Munti, Ratna Batara, et al., 2016, "Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan", Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan MaPPI FH UI, Depok

Panggabean, Henry P., 2002, "Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktek Sehari-hari", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

Pokja Laporan Tahunan MARI, 2017, "Laporan Tahunan 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia", Mahkamah Agung RI, Jakarta

Quast, Shelby, 2008, "*Justice Reform and Gender.*" (*"Reformasi Kepolisian dan Gender."*) *Gender and Security Sector Reform Toolkit* (Toolkit Gender dan Reformasi Sektor Keamanan). Para penyunting Megan Bastick dan Valasek, Kristin, DCAF, OSCE/ODIHR, UNINSTRAW, Jenewa

Rahardjo, Satjipto, 2000, "Ilmu Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung

Reksodiputro, Mardjono, 1994, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi”, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017, “Problematisa Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal”, Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial, Jakarta

Sihite, Romany, 2007, “Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

Siscawati, Mia, 2015, “Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Siklus Pengelolaan Program”, Forest Governance Program Phase 2 (FGP 2) Kemitraan, Bogor

Situmorang, Lexy J., 2001, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2012, “Pengantar Penelitian Hukum”, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta

Sunggono, Bambang, 1997, “Metodologi Penelitian Hukum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Suteki, 2015, “Masa Depan Hukum Progresif”, Thafa Media, Yogyakarta

B. Jurnal

Adonara, Firman Floranta, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, Nomor 2, Juni 2015

Amanda, Putri K., dkk., “Mencegah dan Melindungi: Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Bukti”, Jurnal Peradilan Indonesia Vol. 4 Januari – Juli 2016

C. Peraturan Perundang-Undangan, Naskah Akademik, Peraturan dan Surat Keputusan Lembaga Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018 Nomor: M.HH-01.HN.03.03

Naskah Akademik Rancangan PERMA Penanganan Perkara Berperspektif Gender, 2016

Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) nomor SE-007/A/JA/11/2011 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) nomor 88/ KMA/ SK/ V/ 2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/ PK/ PID/ 2010 atas nama Terpidana Yakup tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1390/ Pid.B/PA/2007/PN.LP

E. Internet

- Admin PA Payakumbuh, 2018, “Pertemuan Hakim Perempuan Empat Lingkungan Badan Peradilan Se-Indonesia”, <http://pa-payakumbuh.go.id/pertemuan-hakim-perempuan-ikahi/91>, diakses pada 21 Februari 2018
- Admin PN Yogyakarta, 2017, “Sosialisasi Maklumat KMA NO. 01/ Maklumat/ KMA/ IX/ 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya”, http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tag/T02-P02-02/2017092216222052784534759c4d64c2e07b.html#tabs|Tabs_Group_name:tabGaleri, diakses pada 21 Februari 2018
- Asshiddiqie, Jimly, “Penegakan Hukum”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses pada 16 November 2017
- Azizah, 2018, “Ketua MA: Hakim Perempuan Indonesia Memiliki Peran Penting dalam Pembangunan Hukum Nasional”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2905/ketua-ma-hakim-perempuan-indonesia-memiliki-peran-penting-dalam-pembangunan-hukum-nasional>, diakses pada 22 Februari 2018
- Azizah, 2018, “MA Peringati Hari Perempuan Internasional”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2962/ma-peringati-hari-perempuan-internasional>, diakses pada 6 April 2018
- Badilag Mahkamah Agung, “Badilag Ikut Membahas Rancangan Perma Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/badilag-ikut-membahas-rancangan-perma-perempuan-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada 8 September 2017
- CR19, 2015, “Atasi Kejahatan Seksual, Ini Solusi Komnas Perempuan” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt563b789d353ae/atasi-kejahatan-seksual--ini-solusi-komnas-perempuan>, diakses pada 21 Februari 2018
- Detik.com, “Ada Pengadilan Terpadu, Jangan Coba-Coba Lakukan Kekerasan pada Perempuan”, [news.detik.com, http://news.detik.com/berita/1774034/ada-pengadilan-terpadu-jangan-coba-coba-lakukan-kekerasan-pada-perempuan?nd771104bcj](http://news.detik.com/berita/1774034/ada-pengadilan-terpadu-jangan-coba-coba-lakukan-kekerasan-pada-perempuan?nd771104bcj), diakses pada 21 September 2017

- Diani, Hera, 2017, “Kapolri Diminta Revisi Aturan, Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan Seksual”, <http://magdalene.co/news-1461-kapolri-diminta-revisi-aturan-prosedur-penanganan-kasus-kekerasan-seksual.html>, diakses pada 8 Februari 2018
- Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, “Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)”, dalam http://uppabareskrim.com/profil_cha.php diakses pada 21 November 2017
- Erdianto Kristian, 2016, “Budaya Patriarki Dinilai Kerap Jadikan Perempuan sebagai Objek Seksual”, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/03/14374931/Budaya.Patriarki.Dinilai.Kerap.Jadikan.Perempuan.sebagai.Obyek.Seksual>, diakses pada 25 Februari 2018
- Ferri K, Rendika, 2017, “Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di DIY Masih Tinggi”, <http://jogja.tribunnews.com/2017/10/27/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-diy-masih-tinggi?page=1>, diakses pada 25 Februari 2018
- Gil, Emerlynne, 2016, “*Southeast Asian Judges Adopt Guidance on Applying a Gender Perspective in Their Work*”, <https://www.icj.org/southeast-asian-judges-adopt-guidance-on-applying-a-gender-perspective-in-their-work/>, diakses pada 6 April 2018
- Humas Mahkamah Agung, 2010, “Ketua MA Membuka Seminar Akses Terhadap Pengadilan Agama”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/951/ketua-ma-membuka-seminar-akses-terhadap-pengadilan-agama>, diakses pada 6 April 2018
- Humas Mahkamah Agung, 2011, “Ketua MA Menghadiri MoU SPPT PKKTP”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/768/ketua-ma-menghadiri-mou-sppt-pkktp>, diakses pada 6 April 2018
- Humas Mahkamah Agung, 2012, “MA dan KPP PA Tandatangani Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemenuhan Hak Anak”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/696/ma-dan-kppa-tandatangani-kesepakatan-bersama-tentang-penguatan-kelembagaan>, diakses pada 6 April 2018
- Humas Mahkamah Agung, 2013, “Capaian MA di Tahun 2013”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/1613/capaian--ma-di-tahun-2013>, diakses pada 6 April 2018

- ICJR, “ICJR Mengapresiasi Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”, <http://icjr.or.id/icjr-mengapresiasi-terbentuknya-peraturan-mahkamah-agung-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/>, diakses pada 8 September 2017
- Ismail, Maqdir & Partners, “Mahkamah Agung – Badan Legislatif Ke-Empat di Indonesia”, <https://mip-law.com/uncategorized/mahkamah-agung-badan-legislatif-ke-empat-di-indonesia/>, diakses pada 16 Oktober 2017
- Keaokiriya, Pimvadee, 2015, “*Regional Judicial Dialogue on Judging with a Gender Perspective*”, <http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/events/2015/09/regional-judicial-dialogue-on-judging-with-a-gender-perspective>, diakses pada 6 April 2018
- Kementerian PPN/ Bappenas, 2013, “Tindak Lanjut Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)”, https://www.bappenas.go.id/files/8013/4986/1938/paparan-stranas-pprg-d1-bappenas__20130307145533__2.pdf, diakses pada 7 April 2018
- Komnas Perempuan, “Kekerasan Seksual,” Lembar Info Komnas Perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id/wpcontent/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses 27 Maret 2018
- Komnas Perempuan, “Peluncuran Laporan Hasil Assessment 64 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 16 Propinsi di Indonesia: “Memastikan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak-hak Perempuan Korban Kekerasan””, Siaran Pers Komnas Perempuan, <https://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-laporan-hasil-assessment-64-pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-p2tp2a-di-16-propinsi-di-indonesia-memastikan-tanggung-jawab-negara-dal/>, diakses pada 13 September 2017
- Komnas Perempuan, tanpa tahun, “Profil Komnas Perempuan”, <https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-komnas-perempuan>, diakses pada 7 April 2018
- Nofriandi, Pepy, 2017, “Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Family Court of Australia, Federal Court of Australia Memperbarui Nota Kesepahaman Kerjasama Peradilan”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2646/mahkamah-agung-republik-indonesia-dan-family-court-of-australia-federal-court-of->

australia-memperbarui-nota-kesepahaman-kerjasama-peradilan, diakses pada 6 April 2018

Nurherawati, Sri, “Putusan Pengadilan atas Perkara Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Privat”, <https://www.komnasperempuan.go.id/putusan-pengadilan-atas-perkara-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-privat/>, diakses pada 21 September 2017

Pratiwi, Andi Misbahul, “Amrina Habibi: Absennya Perspektif Adil Gender Sebabkan Kasus Kekerasan Seksual Tidak Pernah Tuntas”, <https://www.jurnalperempuan.org/berita/amrina-habibi-absenya-perspektif-adil-gender-sebabkan-kasus-kekerasan-seksual-tidak-pernah-tuntas>, diakses pada 11 Januari 2018

Purnawati, Ishmah, 2018, “Kunjungan dan Audiensi Hakim Perempuan Empat Lingkungan Badan Peradilan Se-Indonesia Ke Mahkamah Agung RI”, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/2903/kunjungan-dan-audiensi-hakim-perempuan-empat-lingkungan-badan-peradilan-se-indonesia-ke-mahkamah-agung-ri>, diakses pada 6 April 2018

Qorib, Fathan, “4 Larangan Hakim Saat Mengadili Perkara Perempuan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598bdc7ee400/4-larangan-hakim-saat-mengadili-perkara-perempuan>, diakses pada 25 September 2017

Quamila, Ajeng, 2017, “8 Trauma Fisik dan Mental Akibat Kekerasan Seksual”, <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/trauma-akibat-kekerasan-seksual/>, diakses pada 25 Februari 2018

Rohim, Mahrus Abdur, “Raperma Seputar Perempuan Berhadapan dengan Hukum Menunggu Disahkan”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/raperma-seputar-perempuan-berhadapan-dengan-hukum-menunggu-disahkan>, diakses pada 11 Januari 2018

Sahbani, Agus, “Penting!!! Urgensi Terbitnya PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598af94b94acd/penting-urgensi-terbitnya-perma-pedoman-mengadili-perkara-perempuan>, diakses pada 11 Januari 2018

Satria, Lintar, 2017, “Proses Hukum Masih Mengabaikan Hak Perempuan Korban Kekerasan”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/03/09/omitsw354->

proses-hukum-masih-mengabaikan-hak-perempuan-korban-kekerasan,
diakses pada 23 Februari 2018

Setyawan, Davit, “KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat”, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, diakses pada 11 Januari 2018

Sulistiyawati, Rr. Laeny dan Indah Wulandari, “Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/06/nks2r8-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>, diakses pada 11 Januari 2018

Tim IT, 2018, “Sosialisasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Pengadilan Agama Se Korwil Pekalongan”, http://www.pabatang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=229:2018-02-12-04-43-32&catid=34:berita-intern&Itemid=1, diakses pada 21 Februari 2018

UN Women Asia and the Pacific, 2013, “*Southeast Asia Regional Judicial Colloquium on Gender Equality Jurisprudence and the Role of The Judiciary in Promoting Women’s Access to Justice*”, <http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/9/womens-access-to-justice>, diakses pada 6 April 2018

United Nations, “*Charter of The United Nations and Statute of The International Court of Justice*”, San Fransisco, diakses melalui <https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf> pada 2 November 2017

Waruwu, Riki Perdana Raya, “Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam PERMA”, https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=139:penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma&catid=9:kegiatan&Itemid=24, diakses pada 10 Januari 2018

Wibowo, “Rifka Annisa: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Yogyakarta Tinggi”, <http://kabarhandayani.com/rifka-annisa-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-yogyakarta-tinggi/>, diakses pada 30 November 2017

F. Hasil Penelitian

Eddyono, Sri Wiyanti, et all., 2016, “*When and Why the State Responds to Women’s Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*”, Research Report, UNRISD, Jenewa

Himawan, Firdaus, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Kridaningtyas, Pratiwi, 2014, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban KDRT (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

Risfandi, Dedi 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar

Triananda, Kharina, 2011, “Viktimisasi Sekunder oleh Sistem Peradilan Pidana terhadap Perempuan Korban Kekerasan”, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok

Wulandari, Sintia Sekar, 2008, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yuana, Arum, 2017, “Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Yogyakarta (Unit PPA Polresta Yogyakarta) dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

G. Lain-lain

Committee on The Elimination of Discrimination against Women, 2015, “*General Recommendation No. 33 on Women’s Access to Justice*”, United Nations

Fithriyah (Ed), 2012, “Indeks Kesenjangan dan Keadilan Gender (IKKG) dan Indikator Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (IKPUG): Kajian Awal”, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta

Heroepoetri, Arimbi 2005, “Kertas Kebjakan; Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Jender Dalam Penanganan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan,” Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Pedoman Umum Bangkok bagi Para Hakim dalam Menerapkan Perspektif Gender di Asia Tenggara

United Nations Human Rights Committee, *General Comment No. 18* (HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 10 November 1989, Para. 1